

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2020



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

PUTUSSIBAU 2021



	<i>halaman</i>
KATA PENGANTAR.	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan .	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. RENSTRA	16
1. Visi	17
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	18
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	39
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dengan baik.

Kami menyadari LAKIP yang disusun ini, belum secara sempurna menggambarkan kinerja yang ideal. Namun kami akan terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu. Disadari bahwa pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap melalui LAKIP Dinas Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 ini, dapat mengambil peran dalam mewujudkan kualitas akuntabilitas publik menuju terwujudnya “**Good Governance**” di lingkungan Dinas Perhubungan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

Putussibau, Pebruari 2021
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs. H. ABDUL KARIM,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntable sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang disampaikan

kepada atasan masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 mengacu kepada :

1. Keputusan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 852 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, kepada publik/pemberi mandat (Bupati Kapuas Hulu) yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2020 yang didasari oleh RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Strategik (Resentra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021.

2. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan unit pelayanan secara eletronik bahwa merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh:

1. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Aparatur.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 2 (dua) seksi yaitu Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan dan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
4. UPT;
5. Kelompok Pejabat Fungsional;

Struktur Organisasi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran .

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah :

“Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah”

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Adapun struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Perhubungan, yang berada dibawa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum teknis Dinas Perhubungan, sesuai dengan kewenangan dibidang perhubungan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Perhubungan,
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Perhubungan dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan program kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang Perhubungan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan secara periodik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan pada Dinas Perhubungan, dipimpin seorang Sekretaris (Eselon III), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perencanaan program, administrasi kepegawaian, pengelolaan

keuangan, perpustakaan, kearsipan, aset, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas. Adapun Fungsi dari Sekretariat yaitu :

- a. Penyusunan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasi Penyusunan program kerja Dinas ;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
- d. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, dan tata laksana Dinas;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas;
- g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat dibantu oleh Satu orang Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan, dan Satu orang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur.

2.1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan tugas pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV),

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;

- e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
- f. pengendalian dan pelaporan program kerja dinas;
- g. penyelenggaraan tata usaha keuangan Dinas;
- h. penyusunan Neraca, Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas keuangan Dinas.
- j. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2 Subbagian Umam dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata usaha , rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan barang milik Dinas, yang dipimpin seorang Kepala (Eselon IV), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. penyelenggaraan ketatalaksanaan dinas;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, rumah tangga kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- e. pengelolaan barang milik Dinas;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

kegiatan manajemen lalu lintas angkutan jalan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan .

Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yaitu :

- a. penyusunan program kerja Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
- d. pengembangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik;
- h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara periodik; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari seorang Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

3.1 Seksi Manajemen Lalu Lintas Angkutan Jalan, mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dalam melaksanakan manajemen lalulintas angkutan jalan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyusunan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;

- d. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kabupaten serta rencana umum jaringan trayek perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;
- e. persetujuan analisis dampak lalu lintas;
- f. penyediaan perlengkapan jalan;
- g. penetapan tarif ekonomi angkutan orang, perkotaan dan pedesaan dalam daerah kabupaten;
- h. pemberian layanan perijinan angkutan jalan yang wilayah operasinya berada dalam satu daerah kabupaten;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serata pengelolaan sarana perhubungan darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan;
- c. penerbitan izin dan pembangunan fasilitas parkir;
- d. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- e. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor;
- f. penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- g. pembinaan, audit, dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kabupaten;
- h. pengawasan terhadap standar batas maksimum muatan;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (Eselon III) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana dan prasarana serta keselamatan lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. dengan dibantu oleh 2 orang Seksi Eselon IV yaitu Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana.
- Adapun fungsi dari Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai danau dan Penyeberangan yaitu :
- a. penyusunan program kerja Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - b. penyiapan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - c. pembinaan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam daerah kabupaten;
 - d. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - f. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
 - g. pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik;
 - h. pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan secara periodik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perhubungan Sungai dan Danau dibantu oleh Pejabat Eselon IV terdiri dari Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan dan Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana..

4.1. Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan, mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan, dalam melaksanakan manajemen lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi manajemen lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang Manajemen lalu lintas penyeberangan;
- c. pelaksanaan manajemen lalu lintas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan pada jaringan jalan kabupaten dan dalam daerah kabupaten;
- e. penetapan tarif angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- f. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dalam Daerah kabupaten dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan perseorangan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

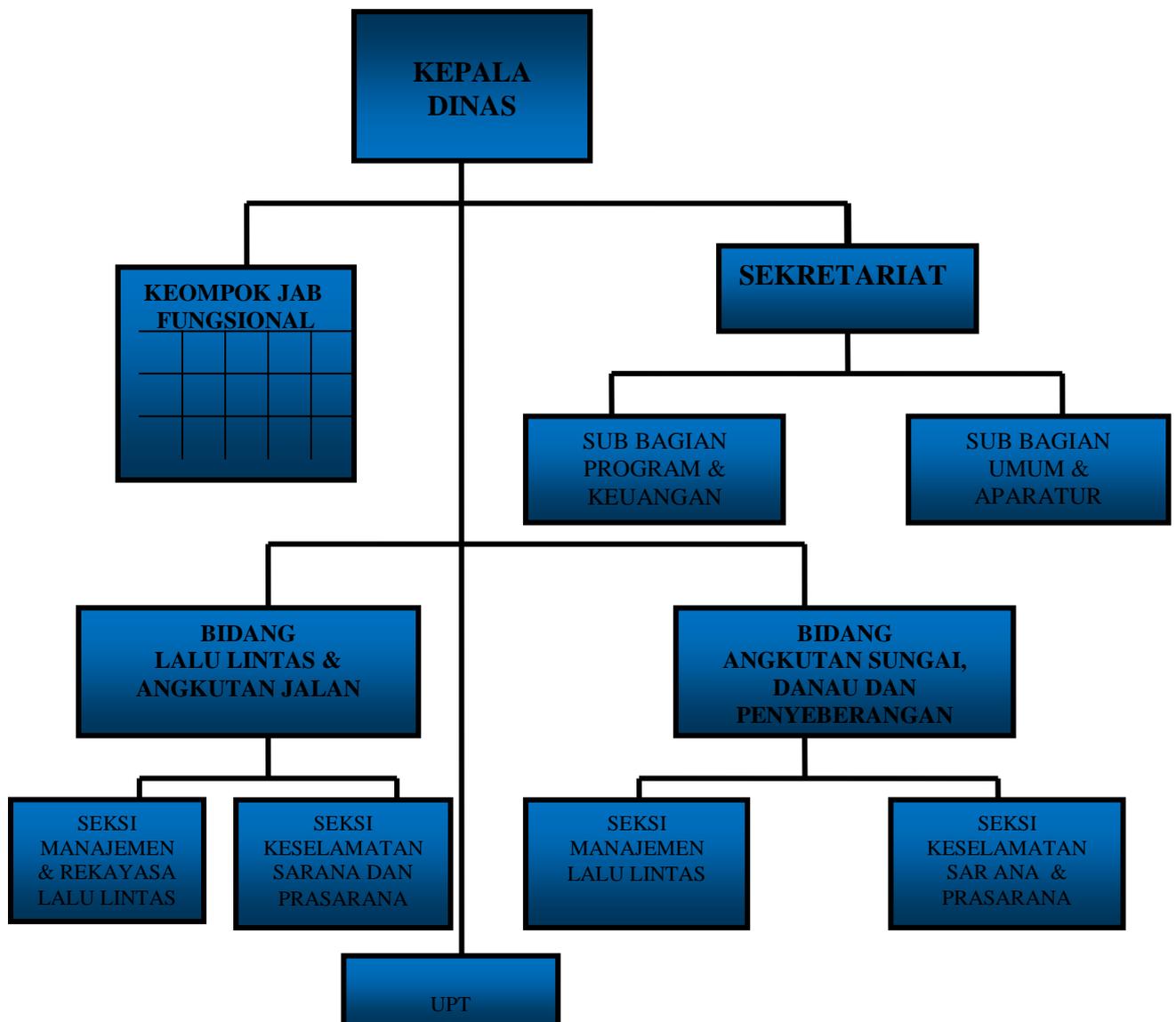
- 4.2. Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dalam mencegah dan menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta pengelolaan sarana perhubungan sungai dan danau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan keselamatan serta sarana dan prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. pembangunan, pelayanan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- d. pelayanan izin usaha, izin pengoperasian pelabuhan 24 jam izin pengerukan, izin reklamasi, izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di pelabuhan lokal dan perairan pelabuhan lokal;
- e. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- f. penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal, sungai, dan danau;
- g. pembinaan keselamatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan, Sarana, dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya, mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

GAMBAR
BAGAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam susunan kepegawaian pada Dinas Perhubungan Kapuas Hulu yang terdiri dari Jabatan Struktural dan staf dengan jumlah keseluruhan sebanyak 26 orang dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Eselon/ Non Eselon	PANGKAT/GOLONGAN																	
		Gol. I				Gol. II				Gol. III				Gol. IV					Jml
		a	b	c	d	a	b	C	D	a	b	C	d	a	b	c	d	e	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3
3.	Eselon IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	1	1	-	-	-	-	-	16
Jumlah		-	-	-	-	2	-	-	3	2	7	3	7	-	1	1	-	-	26

TABEL 2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Eselon/ Non Eselon									Jml
		SD	SMP	SMA	D3	D4	S 1	S 2	S 3	
1.	Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	-	-	2	1	-	3
3.	Eselon IV	-	-	4	-	-	2	-	-	6
4.	Non Eselon	-	-	11	1	-	4	-	-	16
Jumlah		-	-	15	1	-	9	1	-	26

Selain aparaturn Pegawai Negeri Sipil, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki tenaga honorer yang berjumlah 19 orang :

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Anggaran Tahun 2020, bersumber dari dana APBD Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dengan total dana sebesar Rp. 11.741.345.200,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3	4
	APBD 2020	8.242.683.185,-,-	
A.	Pendapatan Asli Daerah	128.000.000,-	
B.	Belanja tidak Langsung	2.239.052.000,-	
1.	Belanja Pegawai :		
	a. Gaji dan tunjangan	1.605.055.000,-	
	b. Tambahan penghasilan	633.997.000,-	
C.	Belanja Langsung	6.003.631.185,-	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.177.422.360,-	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	608.700.000,-	
3.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	78.983.000,-	
4.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	613.775.825,-	
5.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	382.300.000,-	
6.	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	3.142.450.000,-	
	Jumlah APBD 2018 (B+C)	8.242.683.185,-	

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Nilai Asset

yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2020 adalah Rp. 26.829.676.427,88,-

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkret dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu sebagai satu organisasi juga menghadapi dampak langsung ataupun tidak langsung dari perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan itu berupa berbagai aturan yang mengharuskan adanya penyesuaian dan perubahan, faktor internal organisasi, juga faktor- faktor eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi Dinas Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai unit teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu juga memiliki sejumlah permasalahan-permasalahan, Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan antarlain :

1. Tuntutan Masyarakat memberikan Pelayanan Prima;
2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan Peningkatan Kualitas SDM yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan perhubungan, di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan secara terencana dan bertahap, dengan mengutamakan prioritas dan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan,

Rencana Strategis yang telah disetujui dan ditetapkan berfungsi sebagai acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis yang disusun dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Perhubungan di Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka dalam mengimplementasikannya perlu ada komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan kejujuran, keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan oleh seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan *Stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun

sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kondisi ideal yang ingin dicapai serta memberikan arah dan tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus merupakan spirit yang mendorong organisasi agar selalu termotivasi mencapai kondisi ideal yang diharapkan tersebut.

Dengan melihat perkembangan jauh kedepan dimana kendala dan tantangan lebih bervariasi maka perlu mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, didalam mengembangkan peluang secara berkesinambungan agar tidak tertinggal jauh.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, telah menetapkan visi sebagai berikut :

Menuju Kapuas Hulu yang lebih sejahtera, Berdaya saing dan Harmonis

2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik dan bersih.

MISI 2 : Meningkatkan Layanan Infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian

Luasnya Daerah Kapuas Hulu menuntut peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas, hal itu membutuhkan keterlibatan pemodal (investor) dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan peran serta pengusaha lokal.

Disamping itu letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dengan curah hujan yang tinggi dan struktur tanah

yang lembut / lembab menyebabkan biaya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi cukup tinggi, karenanya dibutuhkan keterlibatan pihak lain (swasta) dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana transportasi, yang berkualitas dan berkuantitas.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KERJA UTAMA

3.1. TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Adapun tujuan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi pertama adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Nilai Evaluasi SAKIP

2. Tujuan dari misi kedua adalah Terwujudnya Pelayanan Perhubungan dan Lalu Lintas yang LAIK dan berkualitas

Dengan indikator kinerja untuk mencapai tujuan adalah :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

3.2 SASARAN STRATEGIS

Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sesuai sumber daya yang dimiliki serta alokasi setiap tahun anggaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam waktu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja utama adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. % Perhubungan dalam kondisi baik
4. % Angkutan Umum LAIK jalan

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi. Penetapan Kinerja (TapKin) merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2020 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan Perjanjian Kerja dengan Bupati Kapuas Hulu. Formulir Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 (ANGGARAN PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	BB
2	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	75%
		% Angkutan Umum LAIK jalan	90%

	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.177.422.360,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 608.700.000,-	APBD
3.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 78.983.000,-	APBD
4.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Rp. 613.693.516,-	APBD
6.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 382.300.000,-	APBD
7.	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas	Rp. 3.142.450.000,-	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Anggaran Perubahan) Tahun Anggaran 2020, realisasi capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel : Penyajian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi s/d tahun (n)	Target akhir renstra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	% Capaian kinerja		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi SAKIP	nilai	B	B	BB	B	50	B	BB
2	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	Angka	-	-	< 10	6	60	6	< 10
3	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	75	85	75	88	75	85
		% Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	%	-	75	75	80	107	80	80
		% Angkutan Umum LAIK jalan	%	-	80	90	90	90	100	90

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

- Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP dengan Target BB, telah terealisasi dengan capaian kinerja 50 % dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Sakip tercapai dengan Nilai Evaluasi B Berdasarkan Hasil Evaluasi tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra mencapai 80% dari target yang ditetapkan.

Faktor yang menunjang peningkatan pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

- a. Tersediannya Anggaran;
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang/seksi dan instansi terkait;
- c. Adanya dukungan dari stakeholders.

Faktor yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 88 % yaitu sebesar 75% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Tahun 2020 tidak di lakukan survey dan nilai IKM berdasarkan hasil Survey 2019.

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 88 % dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik tercapai 107% yaitu sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar

75%, pada tahun 2020 pembangunan prasarana perhubungan yang dilakukan yaitu pengadaan lampu penerangan jalan umum, Pembangunan rambu-rambu lalu lintas dan Pembangunan tambatan perahu/lanting.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 mengalami peningkatan dari target sebesar 70%

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 100% dari target yang ditetapkan

- Indikator kinerja % Angkutan Umum LAIK Jalan tercapai 94% yaitu sebesar 80% dari target yang ditetapkan sebesar 85%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 62%

Jika dibandingkan dengan target akhir renstra mencapai 88% dari target yang ditetapkan

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut

- a. Masih terbatasnya Sumber daya manusia (SDM) di bidang teknis perhubungan baik secara kualitas maupun kuantitas ;
- b. Masih terbatasnya kesadaran masyarakat terhadap hukum di Bidang Perhubungan (Darat, Sungai, Danau dan penyeberangan).
- c. Masih lemahnya koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan sehingga keterpaduan pelayanan kepada masyarakat belum optimal baik di bidang operasional maupun di bidang usulan pembangunan.
- d. Masih terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan program dan kegiatannya

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas, dilakukan dengan cara :

1. Mengikutsertakan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Diklat-Diklat teknis Perhubungan, sebagai upaya meningkatkan SDM.

2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan setiap tahun serta penyuluhan-penyuluhan di bidang tertib transportasi.
3. Penambahan dana pembangunan baik dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten dan pihak swasta.

Faktor yang memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan prioritas kebutuhan;
- b. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana; dan
- c. Pembinaan personil/petugas

Program yang menunjang untuk pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
3. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi anggaran secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel
**REALISASI ANGGARAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.126.900,00	APBD	4.123.600,00	99,52	3.400,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.680.000,00	APBD	51.445.892,00	97,66	1.234.108,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12.000.000,00	APBD	9.208.600,00	76,74	2.791.400,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	104.480.000,00	APBD	104.480.000,00	100	0,00
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	79.960.000,00	APBD	79.960.000,00	100	0,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	29.900.000,00	APBD	29.900.000,00	100	0,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.102.000,00	APBD	37.102.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.640.000,00	APBD	25.640.000,00	100	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	3.529.000,00	APBD	3.529.000,00	100	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.800.000,00	APBD	23.000.000,00	96,64	800.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.000.000,00	APBD	11.000.000,00	100	0,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.600.000,00	APBD	50.600.000,00	100	0,00
	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	189.239.820,00	APBD	189.209.810,00	100	0,00
	Rapat-rapat Koordinasi & Kunjungan Kerja Dalam Daerah	161.330.000,00	APBD	161.330.000,00	100	0,00
	Penyediaan Adminitrasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.487.640,00	APBD	71.658.640,00	98,86	829.000,00
	Penyusunan RKA dan DPA	2.447.000,00	APBD	2.447.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	309.600.000,00	APBD	309.600.000,00	100	0,00
	Penyediaan Jasa Publikasi	7.500.000,00	APBD	7.500.000,00	100	0,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	146.000.000,00	APBD	145.728.000,00	99,81	272.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	215.000.000,00	APBD	214.478.000,00	99,76	522.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	247.700.000,00	APBD	247.699.850,00	100	150,00
3.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja					
	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja SKPD (LAKIP)	1.963.000,00	APBD	1.963.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	2.590.000,00	APBD	2.590.000,00	100	0,00
	Pendataan dan Pengelolaan Aset SKPD	52.657.000,00	APBD	52.657.000,00	100	0,00
	Penyusunan Rencana Kerja Dishub	19.263.000,00	APBD	19.263.000,00	100	0,00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.510.000,00	APBD	2.510.000,00	100	0,00
4.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					
	Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan	287.775.825,00	APBD	287.411.516,00	99,98	82.309,00
	Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	122.340.000,00	APBD	122.320.000,00	99,98	20.000,00
	Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau	92.000.000,00	APBD	91.999.000,00	100	93.850,00
	Pemeliharaan/Rehabilitas Fasilitas ASDP	26.000.000,00	APBD	26.000.000,00	100	0,00
	Pelayanan KIR Keliling	7.370.000,00	APBD	7.370.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
	Pengamanan Hari-hari besar keagamaan dan lokasi parkir	22.398.000,00	APBD	22.398.000,00	100	0,00
	Pemeliharaan Fasilitas Umum Lalu Lintas Darat	19.000.000,00	APBD	19.000.000,00	100	0,00
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan (Pengganti Perda No. 8 dan Perda No.9 Tahun 2015)	18.600.000,00	APBD	18.600.000,00	100	0,00
	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum(Pengganti Perda No. 7 tahun 2015, Perda No 3 Tahun 2013 dan Perda Nomor 4 Tahun 2013)	14.400.000,00	APBD	14.400.000,00	100	0,00

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase capaian anggaran (%)	Sisa anggaran (Rp.)
1.	2	3	4	5	6	7
5.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan					
	Pembangunan Halte Bus,Taxi Gedung Terminal	84.050.000,00	APBD	83.741.000,00	100	300.000,00
	Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting	298.250.000,00	APBD	297.692.000,00	100	309.000,00
	Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	3.142.450.000,00	APBD	3.136.271.890,00	99,80	6.178.110,000
	Penyediaan Lampu Jalan Kota	1.856.000.000,00	APBD	1.851.868.190,00	99,78	4.131.810,00

dapat dijelaskan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.126.900,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4.123.500,00 atau 99,92%. Output kegiatan adalah terpenuhinya kegiatan jasa surat menyurat. Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa surat menyurat.
- 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.680.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 51.445.892,00 atau 97,66% Output kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran jasa telepon, listrik, air dan internet. Outcome kegiatan adalah tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air.
- 3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.208.600,00 atau 76,74% Output kegiatan adalah terpenuhinya pembayaran perijinan kendaraan dinas. Outcome kegiatan adalah tersedianya perijinan kendaraan dinas.
- 4) Kegiatan Penyediaan administrasi keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.104.480.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 104.480.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa administrasi keuangan.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.960.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 79.960.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya pembayaran jasa pengamanan dan kebersihan kantor Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa pengamanan dan kebersihan kantor.

- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.900.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 29.900.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya. pembayaran jasa perbaikan peralatan kerja Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.
- 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.37.102.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 37.102.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.
- 8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.640.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 25.640.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.
- 9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.529.000,00 realisasi anggaran sebesar 3.529.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.
- 10) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan sebesar Rp.23.800.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 23.000.000,00 atau 99,64% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Outcome kegiatan adalah terciptanya kelancaran administrasi perkantoran.
- 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp.11.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.000.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Outcome adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- 12) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp.50.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 50.600.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome adalah tersedianya bahan Makanan dan Minuman.
- 13) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.239.820,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 189.209.810,00 atau 99,98% Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome kegiatan adalah terpenuhinya undangan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.
- 14) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.161.330.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 161.330.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah.
- 15) Kegiatan Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.72.487.640,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 71.658.640,00 atau 98,86% Output kegiatan adalah terlaksananya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Outcome kegiatan adalah terpenuhinya Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- 16) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.447.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. Rp.2.447.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan RKA dan DPA Outcome kegiatan adalah tersedianya RKA dan DPA.
- 17) Kegiatan Penyediaan jasa pendukung kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.309.600.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 309.600.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan jasa pendukung kantor Outcome kegiatan adalah tersedianya jasa pendukung kantor.

18) Kegiatan Penyediaan jasa publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan jasa publikasi Outcome kegiatan adalah tersedianya tersedianya jasa publikasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 214.478.000,00 atau 99,76%. Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kerja. Outcome kegiatan adalah tersedianya Gedung Kantor dalam Kondisi baik.

2) Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Gedung Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.146.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 145.728.000,00 atau 99,81%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor. Outcome kegiatan adalah tersedianya Pagar Kantor.

3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.215.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 214.478.000,00 atau 99,76%. Output kegiatan adalah terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Outcome tersedianya kendaraan dinas yang terpelihara.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (Lakip) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.963.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.963.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (Lakip) Outcome tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD (Lakip).

2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.590.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.590.000,00 atau

100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Outcome tersedianya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

- 3) Kegiatan Penyusunan Pendataan dan Pengeloan Aset SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.657.000,00 realisasi sebesar Rp. 52.657.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan Pendataan dan Pengeloan Aset SKPD Outcome tersedianya data aset.
- 4) Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dishub dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.263.000,00 realisasi sebesar Rp. 19.263.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan Renja SKPD Outcome tersedianya Renja SKPD.
- 5) Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.510.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.510.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD Outcome tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD.

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 1) Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan Lalu Lintas Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 287.472.000,00 realisasi sebesar Rp. 287.411.516,00 atau 99,98% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan pengawasan dan pengawalan lalu lintas Outcome terciptanya ketertiban berlalu lintas di jalan.
- 2) Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.340.000,00 realisasi sebesar Rp. 122.320.000,00 atau 99,98% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Monitoring Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau Outcome terciptanya ketertiban berlalu lintas di sungai.

- 3) Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 91.999.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Manajemen Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Outcome tertibnya ijin berlalu lintas di sungai.
- 4) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas ASDP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 26.000.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Fasilitas ASDP Outcome tersedianya Fasilitas ASDP yang terpelihara.
- 5) Kegiatan Pelayanan KIR Keliling dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.370.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.370.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pelayanan KIR Keliling Outcome tersedianya kendaraan Angkutan Umum yang telah di KIR.
- 6) Kegiatan Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.398.000,00 realisasi sebesar Rp. 22.398.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir Outcome terciptanya keamanan dan ketertiban perayaan hari-hari besar keagamaan.
- 7) Kegiatan Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.398.000,00 realisasi sebesar Rp. 22.398.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Pengamanan Hari-hari besar Keagamaan dan Lokasi Parkir Outcome terciptanya keamanan dan ketertiban perayaan hari-hari besar keagamaan.
- 8) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan (Pengganti Perda No. 8 dan Perda 9 Tahun 2015) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.600.000,00 realisasi sebesar Rp. Rp. 18.600.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kepelabuhan

dan Retribusi Penyeberangan Outcome tidak tersusunlah Perda Tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan karena kurang anggaran.

- 9) Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi di Tepi Jalan Umum (Pengganti Perda No. 7 Tahun 2015, Perda No 3 Tahun 2013 dan Perda 4 Tahun 2013) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.595.000,00 realisasi sebesar Rp. 18.595.000,00 atau 100,00% Output kegiatan adalah terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Penyeberangan Outcome tidak tersusunlah Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi di Tepi Jalan Umum karena kekurangan anggaran.

5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 1) Kegiatan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.050.000,00 realisasi sebesar Rp. 83.741.000,00 atau 99,63 % Output kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan Halte Outcome tersedianya Halte
- 2) Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 298.250.000,00 realisasi sebesar Rp. 297.692.000,00 atau 99,% Output kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan Tambatan Perahu/Lanting Outcome tersedianya Tambatan Perahu/Lanting

6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- 1) Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.286.450.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.284.403.700,00 atau 99,93% Output kegiatan adalah terlaksananya Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat Outcome tersedianya Rambu-rambu Lalu Lintas Darat.

- 2) Kegiatan Penyediaan Lampu Jalan Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.856.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.851.868.190,00 atau 99,78% Output kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Lampu Jalan Kota Outcome tersedianya Lampu Jalan Kota.

Jadi total realisasi Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5.990.021.698,- atau mencapai 98,58% sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp. 13.609.487

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu di susun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Dengan demikian, pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu, yang mengacu pada RPJMD/Rencana Strategis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Renstra telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk mewujudkan Visi dan Misinya.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat memacu pembangunan di sektor transportasi, di Kabupaten Kapuas Hulu dimasa yang akan datang

B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bertolak dari masih adanya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka upaya Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Lebih meningkatkan mutu penyusunan program bidang perhubungan dengan mengacu pada ketentuan.
4. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia Perhubungan, baik melalui Diklat-diklat maupun penyuluhan-penyuluhan berjenjang, kajian-kajian terhadap prioritas pembangunan dalam bentuk survey, penyuluhan dan penertiban bagi pengguna dan penyedia jasa.
5. Lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders melalui rapat-rapat koordinasi teknis secara berkala dan berkesinambungan.
6. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik karena masih banyak daerah-daerah kecamatan yang belum ada sarana dan prasarana transportasi.
7. Lebih meningkatkan kemampuan SDM di bidang Perhubungan.

8. Lebih meningkatkan Tim Work antar Bidang dan Sekretariat Dinas pada Dinas Perhubungan, Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Menciptakan tata usaha kantor yang bersih, akuntable, transparan dan berwibawa untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat/publik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Akhirnya saran dan masukan dari pihak terkait sangat kami harapkan guna penyempurnaan LAKIP ini.

Putussibau, Pebruari 2021
Plt. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu

Drs.H.ABDUL KARIM,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 199403 1 003